Vol 4 No.4 (2025) – November, pp 1401-1412 https://doi.org/10.59025/9wkj1669

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih Melalui Pengabdian Berbasis Penelitian (*Community-Based Participatory Research)* di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Ahmad Robi Ul'zikri[1], M. Doddy Syahirul Alam[1], Mahmuddin Sirait[1], Rizki Masyahbandi[1], Purnama Julia Utami[1], Andi Ilmi Utami Irwan[1], Dian Iskandar[1], Ricky Zulfauzan[1], Anyualatha Haridison[1], Bismar Harris Satriawan[1], Yeni Wulandari[1], Esa Salsa Bella[1]

[1]*Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya*

INFO ARTIKEL

Diserahkan:
20/10/2025
Direvisi:
02/11/2025
Diterima
14/11/2025

***Keywords*:**

Koperasi Merah Putih, Penguatan Kelembagaan, Ekonomi Kerakyatan, Pendampingan Masyarakat, Partisipasi, Palangka Raya

ABSTRAK

Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya merupakan lembaga baru yang berdiri dalam semangat program Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Sebagai lembaga yang baru tumbuh, koperasi ini menghadapi sejumlah persoalan mendasar, antara lain keterbatasan permodalan, lemahnya tata kelola organisasi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan dan kredibilitas koperasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dengan pendekatan Community-Based Participatory Research dilakukan guna mendorong partisipasi aktif anggota dan masyarakat sekitar dalam proses penguatan kelembagaan. Kegiatan utama berupa workshop pembekalan dan pendampingan kelembagaan koperasi dirancang untuk meningkatkan kapasitas manajerial, akuntabilitas, dan transparansi lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kegiatan workshop, yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo untuk memetakan dinamika partisipasi, tantangan, serta peluang penguatan koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi, terbentuknya komitmen bersama dalam pengelolaan modal, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat mitra. Kesimpulannya, model pengabdian berbasis penelitian partisipatif ini terbukti efektif dalam memperkuat kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan

Corresponding author email: ahmad.ul'zikri@fisip.upr.ac.id

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia saat ini diarahkan melalui kebijakan pembentukan koperasi desa/kelurahan baru, salah satunya program Koperasi Merah Putih, yang diluncurkan pemerintah sebagai bagian dari visi ekonomi nasional untuk memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat. Program tersebut membuka akses pembiayaan hingga Rp 3 miliar bagi tiap koperasi desa/kelurahan,

sebagai upaya menggantikan lembaga informal dengan lembaga resmi yang dikelola secara kolektif [1]. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa koperasi baru tersebut menghadapi sejumlah hambatan, khususnya dalam aspek jaminan permodalan dari pusat, mekanisme akses kredit yang belum sepenuhnya siap, serta kapasitas kelembagaan yang masih terbatas.

Pada konteks Kota Palangka Raya, khususnya pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, tampak sejumlah permasalahan yang signifikan. Sebagai lembaga baru yang dibentuk sesuai program pusat, koperasi ini harus segera memiliki akta pendirian, struktur organisasi, dan sistem pengelolaan yang profesional agar memenuhi persyaratan regulasi dan dipercaya oleh masyarakat. Persoalan modal awal dan kepercayaan mitra serta anggota menjadi penghambat utama dalam beroperasinya koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Permasalahan modal muncul dari skema pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana koperasi diharapkan mengakses kredit besar namun dalam waktu yang sama harus memenuhi persyaratan yang belum selalu dipahami oleh pengurus tingkat lokal [2]. Sementara itu, akuntabilitas sebagai lembaga baru menjadi tantangan ketika mekanisme pelaporan, pengawasan anggota, serta transparansi belum berjalan optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koperasi yang baik sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggota [3]. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih rendah karena pengalaman masa lalu perihal koperasi bermasalah, sehingga mitra dan anggota cenderung skeptis terhadap keberlanjutan dan manfaat bergabung [4].

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini diusulkan dengan ide utama melakukan pendampingan kelembagaan terhadap koperasi mitra melalui mekanisme pemetaan tantangan dan peluang secara partisipatif. Kegiatan berupa workshop yang melibatkan pengurus koperasi, anggota, mitra strategis dan pemangku kepentingan lokal. Melalui workshop penguatan kelembagaan koperasi diharapkan teridentifikasi secara komprehensif aspek-aspek kendala modal, kepercayaan anggota, serta struktur kelembagaan yang perlu diperkuat. Selain itu, akan dipetakan peluang-potensi lokal seperti bisnis distribusi kebutuhan pokok, kerjasama UMKM, serta pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis keanggotaan [5].

Tujuan utama kegiatan adalah memperkuat kelembagaan koperasi mitra agar mampu menjalankan fungsi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan dengan landasan pemahaman bersama tentang tantangan dan peluang yang ada. Lebih spesifik, kegiatan bertujuan memetakan secara sistematis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, serta menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan yang sesuai konteks lokal. Harapannya, koperasi dapat meningkatkan kapabilitas pengurus dan anggota dalam mengelola organisasi, membangun sistem akuntabilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat serta mitra usaha.

Dari sisi kajian teoritis, pendekatan tentang partisipasi anggota, tata kelola demokratis, dan trust atau kepercayaan kolektif menjadi relevan [6]. Sebagai contoh, penelitian di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi anggota dan tata kelola memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan koperasi, misalnya pada studi di Aceh ditemukan bahwa partisipasi anggota dan governance secara simultan mempengaruhi keberlanjutan koperasi [7]. Teori kepercayaan sosial juga menunjukkan bahwa dalam konteks organisasi kolektif seperti koperasi, transparansi dan

akuntabilitas merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan dari anggota dan masyarakat luas.

Dalam prakteknya, koperasi desa/kelurahan yang baru dibentuk memerlukan mekanisme strategis untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko kelembagaan termasuk risiko *non-performing loans* akibat pembiayaan besar yang belum diimbangi kapasitas lokal. Sebagai berita terkait, program Koperasi Merah Putih telah mengidentifikasi sejumlah tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakpahaman koperasi, perbedaan potensi ekonomi antar desa/kelurahan serta potensi penyalahgunaan dana [8]. Fakta aktual di lapangan adalah bahwa masyarakat mitra membutuhkan akses informasi yang jelas, kemampuan pengurus yang memadai, serta media komunikasi yang efektif agar koperasi dapat memperoleh kepercayaan dan berkontribusi secara nyata pada ekonomi lokal.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Community-Based Participatory Research (CBPR)* yang menekankan kemitraan sejajar antara peneliti dan masyarakat mitra dalam tiap tahapan kegiatan mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi [9]. Pendekatan ini mendorong proses kolaboratif, pemberdayaan dan pembelajaran bersama yang bersifat siklik dan iteraktif [10].

2.1 Desain Kegiatan

Desain kegiatan dirancang sebagai rangkaian tahap: (1) Survei lapangan dan identifikasi tantangan serta peluang kelembagaan koperasi, (2) Desain workshop pembekalan kelembagaan dengan dua materi inti, (3) Implementasi workshop dan pendampingan (mentoring), (4) Analisis data kegiatan dan masukan peserta menggunakan aplikasi Nvivo, (5) Revisi program dan mentoring lanjutan, (6) Evaluasi capaian perubahan sikap, sosial budaya dan ekonomi, (7) Pelaporan akhir.

Siklus ini sejalan dengan prinsip CBPR yang bersifat iteratif dan partisipatif dalam desain-pelaksanaan-refleksi[11].



Gambar 1. Bagan tahapan kegiatan

2.2 Partisipan

Partisipan utama adalah aparatur pemerintah kelurahan, pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya serta masyarakat mitra yang berpotensi menjadi anggota. Peneliti bekerjasama dengan pengurus koperasi dan tokoh

masyarakat setempat sebagai mitra penuh dalam proses: mulai menentukan masalah, memilih agenda workshop, hingga analisis hasil. Keterlibatan mereka memastikan relevansi lokal dan pemilikannya atas hasil kegiatan.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan secara kualitatif melalui beberapa teknik: (1) observasi lapangan saat survei awal dan selama workshop, (2) diskusi kelompok terfokus *(focus group discussion)* dalam *workshop* untuk menggali persepsi anggota dan masyarakat mitra terhadap kelembagaan koperasi, (3) catatan reflektif peserta dan fasilitator, (4) dokumen hasil workshop dan rekaman diskusi.

Data dikumpulkan selama tahap pelaksanaan dan mentoring sehingga menangkap proses perubahan secara temporal.

2.4 Instrumen

Instrumen utama berupa panduan diskusi kelompok, lembar refleksi peserta, panduan observasi fasilitator dan modul workshop dua materi pembekalan kelembagaan: materi pertama mengenai tata kelola, modal serta transparansi, materi kedua mengenai partisipasi anggota, akuntabilitas sosial dan strategi peningkatan kepercayaan masyarakat. Semua instrumen dirancang bersama mitra koperasi agar kontekstual dan mudah dipahami. Untuk analisis digunakan aplikasi kualitatif NVivo yang memfasilitasi pengkodean tema, pemetaan persepsi, dan visualisasi pola partisipasi *(coding, memoing, thematic analysis)* sesuai pedoman metodologis CBPR [12]

2.5 Disain dan Implementasi Kegiatan

1) Survei lapangan dan identifikasi masalah

Tim bersama mitra melakukan kunjungan ke kantor koperasi dan masyarakat mitra untuk memahami kondisi permodalan, kepercayaan masyarakat dan struktur kelembagaan.



Gambar 2. Kegiatan Survey Lapangan

Tabel 1. Pemetaan Masalah

No	Permasalahan	Deskripsi
1	Permodalan	Skema pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana koperasi diharapkan mengakses kredit besar namun dalam waktu yang sama harus memenuhi persyaratan yang belum selalu dipahami
2	Lembaga	Akuntabilitas sebagai lembaga baru menjadi tantangan ketika mekanisme pelaporan,

		pengawasan anggota, serta transparansi belum berjalan optimal
3	Kepercayaan Publik	pengalaman masa lalu koperasi bermasalah, sehingga mitra dan anggota cenderung skeptis terhadap keberlanjutan dan manfaat bergabung

2) Desain Workshop (2 Materi)

Berdasarkan hasil identifikasi disusun modul workshop dua sesi, sesi pertama memperkuat aspek kelembagaan dan permodalan, sesi kedua memperkuat partisipasi anggota dan strategi peningkatan kepercayaan masyarakat.

Tabel 2. Desain Workshop

No	Sesi	Deskripsi
1	Sesi 1	Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih (prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggota)
2	Sesi 2	Penguatan Partisipasi dan Kepercataan Masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih

3) Implementasi

Pelaksanaan workshop dengan metode partisipatif (*brainstorming*, kelompok diskusi, studi kasus lokal) diikuti dengan mentoring rutin.



Gambar 3. Pelaksanaan workshop Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Senin (13/10/2025)

4) Revisi dan Mentoring

Berdasarkan umpan balik peserta dan hasil analisis awal data, modul direvisi untuk diterapkan di periode mentoring lanjutan.

5) Analisis Data

Semua data hasil workshop dan refleksi peserta diolah menggunakan Software NVivo 15 untuk mengidentifikasi perubahan sikap, sosial budaya dan ekonomi, serta tantangan dan peluang kelembagaan koperasi.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berbasis *Community-Based Participatory Research* (CBPR) di Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya berjalan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan berorientasi pada penguatan kelembagaan koperasi. Kegiatan diawali dengan survei lapangan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi anggota dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Hasil diskusi pada saat survei menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya struktur organisasi, kurangnya pemahaman anggota terhadap prinsip koperasi, serta keterbatasan modal yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat. Temuan awal ini menjadi dasar dalam merancang kegiatan workshop pembekalan kelembagaan dengan dua materi utama, yaitu penguatan tata kelola dan transparansi koperasi serta peningkatan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga koperasi.



Gambar 4. Sapanduk Kegiatan workshop Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih

Pelaksanaan *workshop* dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengurus, anggota, dan masyarakat calon anggota koperasi. Fasilitator mendorong dialog terbuka untuk menggali persepsi dan pengalaman lokal dalam pengelolaan koperasi. Hasil dari sesi pertama workshop menekankan tentang pemahaman pengurus terhadap pentingnya penyusunan laporan keuangan yang transparan dan keterbukaan dalam pengelolaan modal. Pada sesi kedua, diskusi berfokus pada strategi memperkuat solidaritas dan partisipasi aktif masyarakat dalam koperas.



Gambar 5. *Workshop* Sesi 1 Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih (kiri). Sesi 2 Penguatan Partisipasi dan Kepercataan Masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih

Indikator keberhasilan kegiatan diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi. Perubahan sikap terlihat dari meningkatnya antusiasme anggota dalam

menghadiri rapat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Perubahan sosial budaya tercermin dari terbentuknya komunikasi yang lebih terbuka antara pengurus dan anggota serta munculnya semangat gotong royong dalam membangun koperasi. Sementara itu, perubahan ekonomi mulai terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam kegiatan simpan pinjam dan inisiatif anggota untuk memanfaatkan koperasi sebagai mitra usaha mikro. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil mencapai tujuannya dalam membangun dasar kelembagaan yang sehat dan partisipatif.



Gambar 6. Sesi penyampaian pendapat dan masukan dari perwakilan anggota koperasi Merah Putih dan perwakilan masyarakat.

Dari segi keunggulan, kegiatan ini berhasil memfasilitasi proses pembelajaran kolektif yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis anggota koperasi mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan CBPR memungkinkan anggota menjadi subjek aktif dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan, bukan sekadar penerima pelatihan. Selain itu, penggunaan aplikasi Nvivo memperkuat validitas hasil analisis melalui pengkodean sistematis terhadap data kualitatif. Namun demikian, kegiatan ini memiliki kelemahan, terutama pada aspek kesinambungan pendampingan karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Beberapa anggota masih menunjukkan kesulitan dalam menerapkan prinsip manajemen koperasi secara konsisten, terutama dalam penyusunan laporan dan pembagian tanggung jawab organisasi. Hasil identifikasi kebutuhan mitra sebagaimana analisis di atas dapat dilihat pada Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Hasil Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan Mitra dan Permasalahan Masyarakat

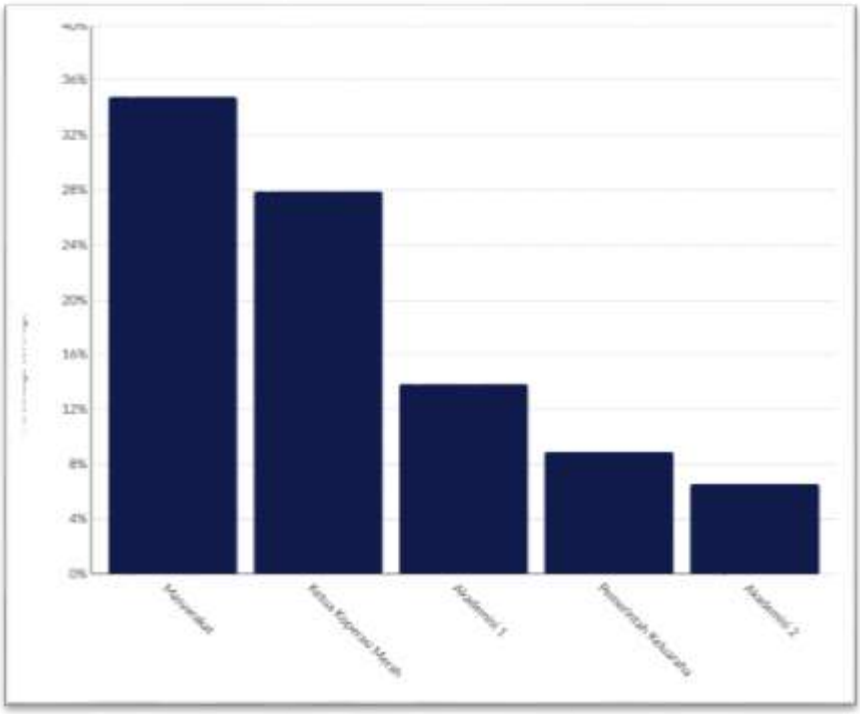
No	Kebutuhan Mitra	Permasalahan
1	Pendampingan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Akuntabilitas sebagai lembaga baru menjadi tantangan ketika mekanisme pelaporan, pengawasan anggota, serta transparansi belum berjalan optimal
2	Perluasan Akses terhadap Permodalan	Skema pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana koperasi diharapkan mengakses kredit besar namun dalam waktu yang sama harus memenuhi persyaratan yang belum selalu dipahami
3	Sosialisasi Penguatan Partisipasi dan Kepercataan Masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih	Pengalaman masa lalu koperasi bermasalah, sehingga mitra dan anggota cenderung skeptis terhadap keberlanjutan dan manfaat bergabung

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan relatif tinggi pada tahap awal, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program. Sebagian besar warga masih memiliki pengalaman negatif terhadap praktik koperasi sebelumnya yang tidak transparan. Melalui proses dialog partisipatif

dan mentoring berkelanjutan, hambatan tersebut perlahan teratasi dengan menunjukkan komitmen pengurus baru terhadap perubahan tata kelola. Beberapa point penting yang menjadi konsen dari hasil diskusi dapat dilihat melalui komparasi wacana melalui analsisi software Nvivo yang disampaikan oleh perwakilan pihak baik Akademisi, Pemerintah Kelurahan, Ketua dan Anggota Koperasi, serta perwakilan Masyarakat Kelurahan Bukit Tunggal.

3.1 Pendampingan Penguatan Kelembagaan Koperasi

Analisis terhadap aspek penguatan kelembagaan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo untuk mengolah data hasil transkrip diskusi, wawancara, dan catatan lapangan selama kegiatan workshop dan mentoring berlangsung. Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa isu mengenai "penguatan lembaga koperasi" menjadi tema dominan yang memperoleh konsen beragam dari berbagai pihak. Persentase tingkat perhatian dan partisipasi terhadap tema ini terbagi sebagai berikut: masyarakat atau anggota koperasi sebesar 34,76%, ketua koperasi 27,87%, akademisi 1 13,83%, pemerintah kelurahan 8,92%, dan akademisi 2 6,51%. Persentase ini menunjukkan tingkat intensitas keterlibatan dan komitmen masing-masing aktor dalam proses penguatan kelembagaan koperasi.



Gambar 7. Hasil nilai intensitas diskusi pada aspek penguatan kelembagaan koperasi

Skor tertinggi yang dicapai oleh masyarakat atau anggota koperasi sebesar 34,76% menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif dan kepemilikan sosial terhadap lembaga koperasi sebagai ruang ekonomi bersama. Data ini mencerminkan perubahan sikap anggota yang semula pasif menjadi lebih partisipatif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program koperasi. Antusiasme anggota yang tinggi dapat diartikan sebagai hasil langsung dari pendekatan partisipatif yang diterapkan melalui model *Community-Based Participatory Research (CBPR)*, di mana masyarakat bukan sekadar objek tetapi menjadi subjek yang memiliki suara dan kepentingan dalam pembangunan kelembagaan. Peningkatan konsen anggota juga menunjukkan tumbuhnya rasa percaya

diri untuk terlibat aktif dalam membangun sistem manajemen koperasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Kontribusi ketua koperasi sebesar 27,87% mengindikasikan adanya komitmen kepemimpinan yang kuat untuk menata ulang struktur organisasi dan memperkuat tata kelola koperasi. Ketua koperasi menjadi aktor strategis dalam menjembatani kepentingan anggota dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan akademisi. Skor ini menegaskan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada partisipasi anggota, tetapi juga pada kapasitas pemimpin dalam menerjemahkan [13] nilai-nilai koperasi ke dalam praktik manajerial yang konkret. Kepemimpinan yang berorientasi pada partisipasi dan transparansi menjadi kunci munculnya perubahan sosial budaya, terutama dalam membangun etos gotong royong dan kepercayaan antaranggota.

Sementara itu, skor akademisi sebesar 13,83% mencerminkan peran penting kalangan akademik sebagai fasilitator dan pengarah metodologis dalam program pengabdian ini. Akademisi memberikan kontribusi pada ranah konseptual dan analitis melalui penyusunan modul pelatihan, panduan diskusi, serta pendampingan berbasis data. Meskipun tidak sebesar skor masyarakat dan ketua koperasi, kontribusi ini bersifat strategis karena membantu proses refleksi dan pembelajaran kolektif yang menjadi ciri utama pendekatan CBPR. Peran akademisi juga memperkuat dimensi perubahan sosial budaya, yaitu terciptanya interaksi horizontal yang egaliter antara ilmuwan dan masyarakat, yang selama ini sering bersifat *top-down* [14].

Keterlibatan pemerintah kelurahan sebesar 8,92% memperlihatkan dukungan administratif dan legitimasi kebijakan terhadap penguatan kelembagaan koperasi. Pemerintah berperan sebagai penghubung antar-lembaga serta penyedia fasilitas dan ruang diskusi bagi keberlanjutan koperasi. Meskipun persentasenya relatif kecil, kontribusi ini penting untuk menjamin kesinambungan program di tingkat lokal dan menjadi indikator perubahan dalam aspek sosial ekonomi, karena dukungan pemerintah berpotensi membuka akses terhadap permodalan dan jaringan usaha. Adapun kontribusi akademisi 2 sebesar 6,51% menunjukkan posisi pendukung dan reflektif terhadap hasil kegiatan, terutama dalam aspek evaluasi dan penyusunan rekomendasi lanjutan. Nilai ini meskipun paling rendah, tetap berfungsi signifikan dalam menjaga obyektivitas analisis data serta memberikan pandangan teoretis untuk memperdalam hasil kegiatan.

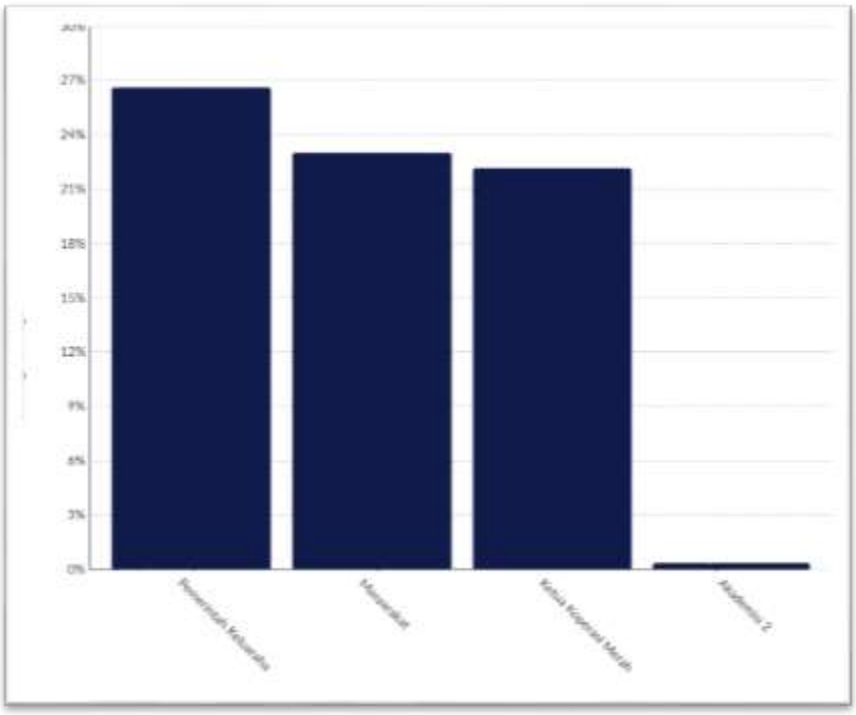
Secara keseluruhan, distribusi skor tersebut menggambarkan pola keseimbangan yang mencerminkan sinergi multipihak dalam penguatan kelembagaan koperasi. Tingginya keterlibatan masyarakat dan ketua koperasi menandai transformasi dari ketergantungan pada aktor eksternal menuju kemandirian sosial ekonomi berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip CBPR bahwa keberhasilan program diukur bukan hanya dari hasil material, tetapi dari munculnya kesadaran kritis, solidaritas sosial, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya sendiri.

Dalam konteks perubahan sikap, data menunjukkan bahwa anggota koperasi kini memiliki rasa memiliki yang lebih kuat terhadap lembaga mereka. Pada dimensi sosial budaya, tumbuh budaya dialog, partisipasi, dan keterbukaan yang memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal. Sedangkan pada dimensi ekonomi, antusiasme anggota dalam mengikuti kegiatan simpan pinjam dan perencanaan usaha bersama menjadi indikasi meningkatnya kemandirian ekonomi berbasis solidaritas. Dengan demikian, hasil analisis Nvivo tidak hanya menggambarkan distribusi partisipasi, tetapi juga

memetakan transformasi nilai dan perilaku yang secara substansial memperkuat keberlanjutan kelembagaan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Bukit Tunggal.

3.2 Perluasan Akses terhadap Permodalan

Analisis tematik terhadap data hasil transkrip kegiatan workshop dan mentoring yang diolah melalui perangkat lunak Nvivo memperlihatkan bahwa isu mengenai akses permodalan menjadi salah satu fokus pembahasan paling strategis dalam proses penguatan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Bukit Tunggal. Berdasarkan hasil pengkodean, tingkat konsentrasi pembahasan oleh para pihak terbagi sebagai berikut: pemerintah kelurahan sebesar 26,59%, masyarakat atau anggota koperasi sebesar 23,03%, ketua koperasi sebesar 22,14%, dan akademisi sebesar 0,32%. Data ini menunjukkan bahwa topik akses permodalan lebih banyak didorong oleh aktor pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan koperasi, sementara peran akademisi lebih banyak bersifat pendukung konseptual dan reflektif.



Gambar 8. Hasil nilai intensitas diskusi pada aspek perluasan akses permodalan koperasi

Tingginya skor pemerintah kelurahan sebesar 26,59% menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan lokal memiliki peran dominan dalam membuka dan memfasilitasi peluang permodalan bagi koperasi. Pemerintah berfungsi sebagai mediator antara koperasi dan sumber-sumber modal potensial, baik dari lembaga keuangan daerah, dana bergulir, maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Skor ini juga mengindikasikan adanya komitmen kuat pemerintah untuk menindaklanjuti arahan program Astacita Presiden yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Konsen ini bukan hanya administratif, tetapi juga politis, yakni menunjukkan antusiasme pemerintah kelurahan untuk menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi lokal. Dari sisi perubahan sosial ekonomi, peran aktif pemerintah memperkuat legitimasi koperasi dan memperluas kepercayaan masyarakat bahwa lembaga ini layak dijadikan wadah ekonomi yang kredibel.

Sementara itu, skor masyarakat sebesar 23,03% memperlihatkan bahwa anggota koperasi memiliki minat dan kebutuhan tinggi terhadap akses modal sebagai sarana untuk mengembangkan usaha mikro dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Data Nvivo menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan masyarakat berkaitan dengan harapan terhadap sistem simpan pinjam yang transparan, kejelasan mekanisme bagi hasil, serta keamanan dana anggota. Hal ini menandakan adanya perubahan sikap dari ketergantungan terhadap lembaga kredit informal menuju upaya membangun kemandirian finansial melalui koperasi. Antusiasme masyarakat terhadap isu ini juga memperlihatkan meningkatnya kepercayaan sosial terhadap koperasi setelah kegiatan workshop, di mana anggota mulai melihat koperasi bukan sekadar lembaga penyimpan uang, tetapi juga sarana pembelajaran ekonomi bersama.

Ketua koperasi memperoleh skor 22,14%, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan koperasi memiliki peran signifikan dalam menata sistem permodalan internal, mengelola dana anggota, serta menjalin kemitraan eksternal. Konsentrasi ini memperlihatkan komitmen ketua dalam memastikan agar sistem keuangan koperasi berjalan transparan dan akuntabel. Ketua koperasi menjadi figur sentral dalam menjembatani aspirasi anggota dengan peluang bantuan modal dari pemerintah. Tingkat partisipasi yang hampir seimbang dengan masyarakat mencerminkan munculnya kepemimpinan partisipatif, di mana pengurus tidak lagi berperan sebagai pengendali tunggal, melainkan sebagai fasilitator bagi partisipasi ekonomi anggota. Dari perspektif perubahan sosial budaya, hal ini menandakan pergeseran nilai dari hierarki ke partisipasi horizontal yang lebih egaliter dalam pengambilan keputusan keuangan.

Sebaliknya, skor akademisi yang hanya sebesar 0,32% memperlihatkan keterlibatan yang minimal dalam isu permodalan, namun hal ini bukan berarti tidak signifikan. Peran akademisi lebih bersifat konseptual dan reflektif, yaitu menyediakan kerangka berpikir dan model analisis untuk memastikan mekanisme permodalan koperasi sejalan dengan prinsip transparansi dan keberlanjutan. Rendahnya skor ini dapat dimaknai sebagai bentuk pembagian peran yang seimbang, di mana akademisi tidak mendominasi diskursus, melainkan memberikan ruang bagi aktor lokal untuk mengambil keputusan ekonomi secara mandiri.

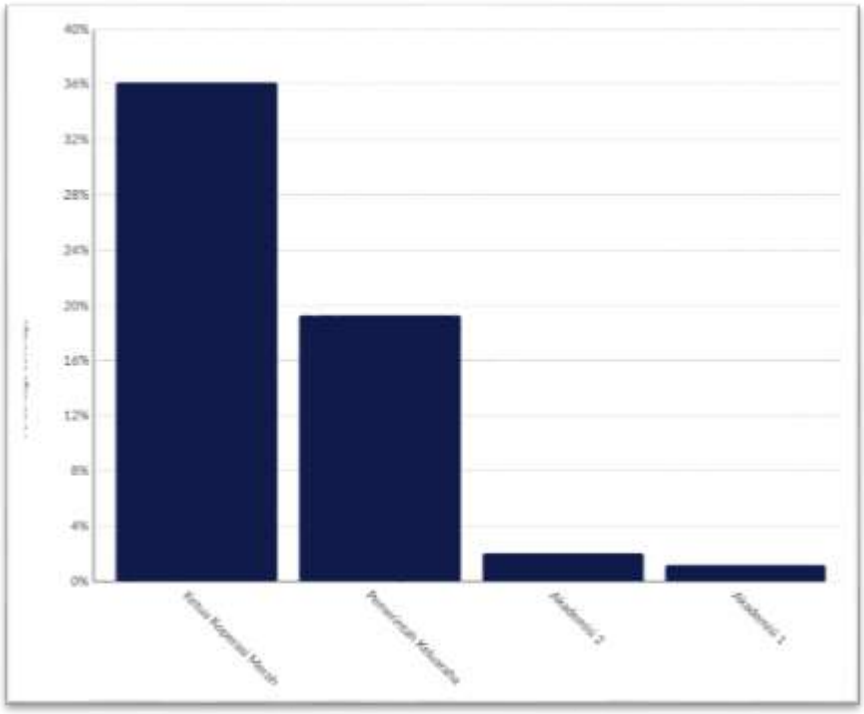
Apabila dikaitkan dengan dimensi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi, maka hasil Nvivo ini menunjukkan hubungan yang saling menguatkan. Dari segi sikap, meningkatnya kesadaran anggota dan pemerintah terhadap pentingnya sistem permodalan yang transparan menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama. Dari segi sosial budaya, terdapat pergeseran nilai dalam cara masyarakat memahami modal: bukan semata bantuan finansial, tetapi juga bentuk solidaritas sosial dan kebersamaan dalam membangun kemandirian ekonomi. Sedangkan dari segi ekonomi, hasil ini memperlihatkan arah transformasi menuju keberlanjutan koperasi, di mana akses modal bukan lagi bergantung pada sumber eksternal, tetapi dibangun melalui konsolidasi internal dan jejaring kemitraan berbasis kepercayaan.

Dengan demikian, data Nvivo pada aspek akses permodalan mencerminkan bahwa kekuatan penggerak utama keberlanjutan Koperasi Merah Putih berada pada sinergi antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pengurus koperasi. Pemerintah menyediakan legitimasi dan akses, masyarakat menghadirkan partisipasi dan komitmen, sementara pengurus memastikan tata kelola yang akuntabel. Ketiga elemen ini merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam membangun

sistem ekonomi koperasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

3.3 Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi Merah Putih

Analisis pada aspek Kepercayaan Masyarakat menggambarkan dinamika relasional antara aktor-aktor utama dalam ekosistem kelembagaan koperasi yang menjadi subjek kegiatan pengabdian. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak Nvivo, diperoleh distribusi konsentrasi perhatian terhadap isu kepercayaan masyarakat sebagai berikut: Ketua Koperasi sebesar 36.12%, Pemerintah Kelurahan 19.30%, Akademisi 2 1.99%, dan Akademisi 1 1.16%. Persentase ini mencerminkan tingkat intensitas partisipasi diskursif dan kedalaman keterlibatan masing-masing pihak dalam membahas dimensi kepercayaan masyarakat terhadap penguatan kelembagaan koperasi.



Gambar 9. Hasil nilai intensitas diskusi pada aspek kepercayaan masyarakat

Tingginya skor yang dimiliki oleh Ketua Koperasi (36.12%) menunjukkan bahwa locus kepercayaan masyarakat masih sangat berpusat pada figur internal lembaga itu sendiri. Ketua koperasi memegang peran simbolik sekaligus substantif sebagai representasi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas lembaga di mata anggota maupun masyarakat luas. Dominasi konsentrasi ini dapat dimaknai bahwa proses penguatan kepercayaan masyarakat bergantung pada performa moral dan manajerial Ketua Koperasi. Dalam konteks komitmen, hal ini memperlihatkan adanya kesadaran internal untuk membangun kredibilitas kelembagaan dari dalam, sementara antusiasme yang tinggi merefleksikan kesediaan pihak pengelola untuk menjadi motor penggerak rekonstruksi sosial yang berbasis pada kepercayaan.

Sementara itu, Pemerintah Kelurahan (19.30%) menunjukkan peran yang relatif moderat namun strategis. Angka ini menandakan bahwa pemerintah lokal hadir sebagai fasilitator yang memberikan legitimasi dan kepercayaan eksternal terhadap koperasi sebagai institusi ekonomi rakyat. Dari segi komitmen, pemerintah memperlihatkan keterlibatan yang cukup intens untuk menjaga hubungan

sosial antara lembaga dan masyarakat, namun belum secara maksimal menjadi pelindung atau penjamin moral dalam sistem pengelolaan koperasi. Dalam kacamata antusiasme, peran pemerintah lebih bersifat administratif dan normatif, dengan kecenderungan fokus pada aspek regulatif dibanding pada pendalaman relasi sosial-kepercayaan.

Kontribusi Akademisi 2 (1.99%) dan Akademisi 1 (1.16%) yang relatif kecil bukan berarti menunjukkan ketidakterlibatan, tetapi memperlihatkan bahwa pendekatan akademik lebih berfungsi sebagai reflective actor dalam proses penguatan lembaga [15]. Akademisi berperan dalam membingkai isu kepercayaan masyarakat dalam konteks teori sosial dan pembangunan partisipatif. Dari sisi komitmen, peran akademisi lebih banyak diarahkan pada transfer pengetahuan, evaluasi, dan penyediaan kerangka normatif agar dinamika kepercayaan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Jika dikorelasikan dengan perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi, maka angka-angka di atas menunjukkan konfigurasi perubahan yang dimulai dari internal lembaga ke eksternal masyarakat. Dominasi Ketua Koperasi menunjukkan adanya proses transformasi sikap dari orientasi individu ke arah orientasi kolektif, di mana penguatan kepercayaan menjadi dasar moral bagi stabilitas kelembagaan. Secara sosial budaya, data ini menandakan bahwa masyarakat masih menilai figur pemimpin sebagai sentral pengendali legitimasi sosial sebuah pola yang umum dalam budaya komunal Indonesia. Artinya, perubahan sosial belum sepenuhnya bergeser menuju sistem kelembagaan yang impersonal dan berbasis aturan, tetapi masih mengandalkan dimensi moral dan simbolik dari pemimpin.

Dari sisi ekonomi, tingginya perhatian Ketua Koperasi dan Pemerintah Kelurahan terhadap isu kepercayaan menunjukkan bahwa keberlangsungan ekonomi koperasi sangat ditentukan oleh stabilitas hubungan sosial di dalamnya. Kepercayaan menjadi variabel kunci yang menghubungkan aspek ekonomi dengan legitimasi sosial. Ketika kepercayaan publik meningkat, partisipasi modal anggota dan sirkulasi ekonomi koperasi juga mengalami kenaikan, menciptakan efek berantai terhadap kesejahteraan kolektif. Sebaliknya, rendahnya proporsi keterlibatan akademisi menandakan bahwa integrasi antara keilmuan dan praktik sosial masih perlu diperkuat, agar perubahan sosial-ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat pragmatis tetapi juga berbasis pengetahuan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, hasil analisis Nvivo menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih bersifat personifikatif, berakar pada figur ketua sebagai pusat legitimasi sosial dan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai fasilitator formal, sedangkan akademisi sebagai reflektor normatif. Konstelasi ini memperlihatkan adanya proses transisi dari pola kepercayaan berbasis figur menuju sistem kelembagaan yang partisipatif, yang jika diperkuat secara konsisten, dapat menumbuhkan perubahan sikap, budaya kolaboratif, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dari sisi produksi luaran, kegiatan berhasil menghasilkan modul pelatihan kelembagaan koperasi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi koperasi lain yang baru berdiri. Peluang pengembangan ke depan cukup besar, terutama dengan memperluas kegiatan pada aspek digitalisasi manajemen koperasi dan memperkuat jejaring kemitraan ekonomi lokal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memperkuat fondasi kelembagaan Koperasi Merah Putih, tetapi juga membuka ruang inovasi ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Bukit Tunggal berhasil mendorong perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Analisis data menggunakan perangkat lunak Nvivo memperlihatkan tiga aspek utama yang saling berkaitan: akses permodalan, kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat.

Pada aspek akses permodalan, dominasi peran pemerintah kelurahan (26.59%) dan masyarakat (23.03%) menegaskan bahwa modal dipahami bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga simbol solidaritas sosial yang memperkuat partisipasi kolektif. Pada aspek penguatan kelembagaan, tingginya keterlibatan Ketua Koperasi (27.87%) dan masyarakat (34.76%) menunjukkan pergeseran paradigma kelembagaan dari sekadar struktur administratif menjadi wadah partisipatif berbasis nilai bersama. Sementara pada aspek kepercayaan masyarakat, dominasi Ketua Koperasi (36.12%) menandakan bahwa integritas kepemimpinan menjadi kunci pembentukan legitimasi sosial, yang perlahan bergeser menuju sistem kepercayaan berbasis nilai dan transparansi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkuat kesadaran kolektif, menumbuhkan komitmen bersama, dan membangun kepercayaan sosial yang menjadi modal utama bagi keberlanjutan ekonomi koperasi. Penguatan kelembagaan koperasi melalui CBPR terbukti efektif menciptakan perubahan sikap, memperkuat budaya gotong royong, serta membangun fondasi ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan Bukit Tunggal atas dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, serta kepada mitra yaitu Ketua dan seluruh anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal yang telah menunjukkan komitmen, keterbukaan, dan antusiasme dalam setiap tahapan kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada masyarakat Kelurahan Bukit Tunggal yang turut berpartisipasi aktif, memberikan pandangan kritis, dan menjadi bagian penting dalam proses penguatan kelembagaan koperasi berbasis partisipasi komunitas. Ucapan terima kasih yang mendalam ditujukan pula kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan yang berperan dalam memberikan pendampingan ilmiah, dukungan metodologis, serta memastikan kegiatan ini berjalan secara sistematis, partisipatif, dan bermanfaat bagi pengembangan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Ayudiana and M. H. Simanjuntak, "Indonesia targets financing 20,000 village cooperatives this year," *Antara News*, 2025. https://en.antaranews.com/amp/news/380753/indonesia-targets-financing-20000-village-cooperatives-this-year

[2] A. Santoso, "Indonesian govt to discuss funding for 80,000 village cooperatives," *Antara News*, 2025. https://en.antaranews.com/news/361337/indonesian-govt-to-discuss-funding-for-80000-village-cooperatives

[3] K. Sunaryo, S. H. E. K, and I. Kusumswardhani, "Implementation of Good Corporate Governance in Cooperatives : A Study in Yogyakarta Indonesia," *Asian J. Soc. Humanit.*, vol. 1, no. 04, pp.

177–190, 2023, doi: doi.org/10.59888/ajosh.v1i04.26.
[4] I. Al Farras, "Red-White Cooperatives," *Independent Observer*, 2025. https://observerid.com/red-white-cooperatives
[5] A. R. Ulzikri, "Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan)," *J. Public Policy*, vol. 6, no. 2, p. 56, 2020, doi: 10.35308/jpp.v6i2.1994.
[6] A. R. Ul'zikri and S. N. Annisa, "Demokrasi Di Tempat Kerja : Analisis Diskursus Melalui Pendekatan Classroom Action Research," *Wacana J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. Interdisiplin*, vol. 11, no. 02, pp. 764–776, 2024, doi: 10.37304/wacana.v11i2.17525.
[7] C. Eka, R. Putri, M. Indriani, U. S. Kuala, and B. Aceh, "The Role of Member Participation and Governance on Sustainability : Evidence from Cooperatives in South Aceh," *J. Account. Res. Organ. Econ.*, vol. 5, no. 2019, pp. 147–155, 2022, doi: doi.org/10.24815/jaroe.v5i2.22186.
[8] R. Nasution, "Weighing risks and rewards of Red and White Village Co-ops," *Antara News*, 2025. https://en.antaranews.com/news/357057/weighing-risks-and-rewards-of-red-and-white-village-co-ops?
[9] A. D. Syphard *et al.*, "Evaluating perceptions of green stormwater infrastructure (GSI) through a community-based participatory research (CBPR) approach," *Environ. Res. Lett.*, vol. 20, 2025, doi: doi.org/10/1088/1748-9326/adc9c5.
[10] Y. Zhang *et al.*, "Community-based participatory research (CBPR) approaches in vaccination promotion: a scoping review," *Int. J. dor Equity Heal.*, vol. 23, no. 227, pp. 1–17, 2024, doi: /doi.org/10.1186/s12939-024-02278-1.
[11] N. H. Woolf and C. Silver, *Qualitative analysis using NVivo: the five-level QDA® method*. London: Routledge, 2017.
[12] B. A. Israel, E. Eng, A. J. Schulz, and E. A. Parker, *Methods in Community-Based Participatory Research for Health Edition: 1*. New York & London: Jossey-Bass, 2005.
[13] C. Skerritt *et al.*, "Middle leaders as policy translators : prime actors in the enactment of policy enactment of policy," *J. Educ. Policy*, vol. 38, no. 4, pp. 567–585, 2023, doi: 10.1080/02680939.2021.2006315.
[14] C. C. Cruz, *Decolonizing Philosophy of Technology : Learning from Bottom-Up and Top-Down Approaches to Decolonial*. Springer Netherlands, 2021. doi: 10.1007/s13347-021-00489-w.
[15] C. von Soest, "Why Do We Speak to Experts ? Reviving," *Perspect. Polit.*, vol. 21, no. 1, pp. 277–287, 2023, doi: 10.1017/S1537592722001116.